

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Agoes Parera. (2019). *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Yogyakarta : PT Kanisius.
- Dewan Komisiner OJK. (2015). *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi 2*. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.
- Dwi Tatak Subagiyo & Fries Melia Salviana. (2016). *Hukum Asuransi*, Surabaya : Revka Petra Media.
- Faridatul Fauziah. (2016). *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian*, Jakarta : Fikra Publishing.
- H. Margono (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta : Sinar Gratifika.
- Hermansyah. (2011). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- M. Agus Santoso. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Mulhadi. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok : Raja Grafindo Perkasa.
- Nurmayani. (2000). *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Prayudi. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan Khairandy. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Perss.
- R.Subekti. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Jakarta : Intermesa.
- R. Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermesa.
- R. Wirjono Projodikoro. (2000). *Asas-asas hukum perjanjian*, Bandung : CV Bandar Maju.
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, S. (2014). *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sondang P Siagian. (2000). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sujanto. (1986). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Umar Sholahudin (2021). *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Malang : Setara Press.
- Victor M, Situmorang, Yusuf Juhir. (1993). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wetria Fauzi. (2019). *Hukum Asuransi di Indonesia*, Padang : Andalas University Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.05/2014 Tentang Pemeriksaan

Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian.

C. Jurnal

- Andi Muhammad Reza Pahlevi. (2018). Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia. *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol. 7. No. 2. 179 – 194.
- Anto Kustanto, Adityo Putro Perkoso. (2021). Polis sebagai Kekuatan Hukum Asuransi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No.1*. 1-10.
- Arikha Saputra, Dyah Listiyorini, Muzayanah. (2021). Tanggungjawab Asuransi dalam Mekanisme Klaim pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1*. 211-222.
- Arman Tjoneng, Cristin Septina, Rizsal Epani. (2019). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Memutus Perkara Perlindungan Konsumen. *Majalah Hukum Nasional*. Nomor 2. 87 – 106.
- Budi Badruzaman. (2019). Perlindungan Hukum Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No.1*. 91-114.
- Chandra Dewi Puspitasari. (2007). Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). *Jurnal Civics*. Vol. 4. No. 2. 91 – 103.
- Deny Guntara. (2016). Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang mengaturnya. *Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, NO 1*. 29-46.
- Fatimah, F., Badriyah, S. M., & Irawati. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit. *NOTARIUS*, Volume 14 Nomor 2. 818-832.
- Heri Hartanto. (2016). Perlindungan Hak Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Vol. 2, No. 2*. 315-328.
- Husaini, F. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016*. 46-54.
- Muhamad Alfi, ETTY Susilowati, Siti Mahmudah. (2017). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perkara Kepailitan Asuransi. *Diponogoro Law Jurnal Volume 6, Nomor 1*. 1-9.
- Nianda Dinilah Arifah, Elisatris Gultom, Nyulistiowati Suryanti. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran *Underlying Investment* oleh Perusahaan Asuransi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 40

- Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Sains Sosio Humaniora Volume 5 Nomor 2 Desember*. 1230-1234.
- Retno Wulansari. (2017). Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi Di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum Vol. 2 No. 1*. 103-116.
- Rida Ista Sitepu, Hana Muhamad. (2021). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 3, No. 2, 2021. 7 - 14.
- Selvi Harvia Santi. (2017). Prinsip Utmost Good Faith dalam Perjanjian Asuransi Kerugian. *UIR Law Review Volume 01, Nomor 01*. 77-82.
- Siswadi. (2018). Pinsip-Prinsip Hukum dalam Praktik Asuransi sebagai Solusi Menghindari Kerugian atas Peristiwa yang terjadi pada Lembaga Perasuransian. *Jurnal Ummul Qura Vol XI, No. 1*. 152-160.
- Wanda Agustiranda, Yuliani, Samadi W Bakar . (2019). Pengaruh Pendapatan Premi, Pembayaran Klaim dan Risk Based Capital Terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan Vol. XIV, No. 1*. 1-12.

D. Bahan Lain

- Anonim, “*Kronologi Kasus Asuransi Jiwa Kresna Life Hingga Dihukum OJK*”, CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2020081416191178535867/kronologi-kasus-asuransi-jiwa-kresna-life-hingga-dihukum-ojk>.
- Evelin Wijasih. (2022). *Perlindungan hukum pemegang polis terhadap gagal bayar perusahaan Asuransi Jiwasraya*, Yogyakarta : Skripsi Universitas Tarumanegara.
- Habeahan, B. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Atas Kepailitan Perusahaan Asuransi*. Medan: Laporan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen.
- Kemdikbud, “Perlindungan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/lindung>.
- Kemdikbud, “Hukum”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/hukum>.
- Kristin Desi Butar Butar. (2019). *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Transaksi Saham Yang Berfluktuasi Di Pasar Modal*. Padang : Skripsi Universitas Andalas Padang.
- Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022, antara Lukman Wibowo dan kawan-kawan melawan PT Asuransi Jiwa Kresna & Nelly dan kawan-kawan.
- Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, 8 Juni 2021, antara Nelly melawan Lukman Wibowo & PT Asuransi Jiwa Krena.

- Maryanto. (2014). *Pengaruh Filsafat Positivisme dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum UNNISULA.
- Muhammad Yori Desiyanto. (2018). *Prinsip Subrogasi pada Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Di Yogyakarta*, Yogyakarta : Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Muzaki, A. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Nabela. (2020). *Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Peer To Peer Lending Fintech Syariah Perspektif Hukum Islam*. Palangka Raya : Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst., 18 februari 2021. Antara Lukman Wibowo melawan PT Asuransi Jiwa Kresna.
- Rizki Iman Faiz Pratama. (2020). *Pertanggung jawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya*. Yogyakarta : Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Yunas Tri Antoro. (2019). *Kepastian Hukum Kewenangan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan*. Yogyakarta : Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

